

NASKAH PUBLIKASI

**EVALUASI PROGRAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018**

Oleh:

Wahyu Wasono Jati

20150520091

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

NIK: 19650827199709 163 055

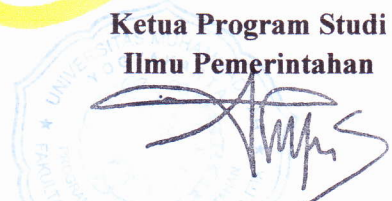
Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

NIK: 19690822199603163038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

NIK: 19660828199403163025

EVALUASI PROGRAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

Wahyu Wasono Jati

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

wahyujati46@gmail.com

Abstrak

Banjarnegara adalah sebuah kabupaten yang berada di tengah pulau jawa dan terdiri dari gugusan pegunungan nan indah, didukung oleh adanya corak pemandangan yang mempesona. Keanekaragaman hayati juga ikut mewarnai khasanah alam di Banjarnegara. Keadaan alam yang bergunung dan memiliki lereng yang curam membuat Banjarnegara memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup tinggi. Pemerintah kabupaten Banjarnegara melalui BPBD Banjarnegara memiliki program mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam Penelitian ini teori yang digunakan untuk mengevaluasi program mitigasi bencana tanah longsor adalah teori evaluasi milik Dunn yang membagi menjadi enam indikator mengukur evaluasi, keenamnya adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsifitas, dan ketepatan. Kemudian penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Program mitigasi bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara adalah sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana, pembentukan desa tangguh bencana, dan penyusunan peta risiko bencana. Sumber anggaran yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana adalah APBD dan dana iuran anggota BPBD. Program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana pada tahun 2018 dilaksanakan di tujuh desa dan satu sekolahan, program ini dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.00, hasil dari program ini adalah masyarakat menjadi lebih tahu mengenai daerah rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara. Program pembentukan desa tangguh bencana atau DESTANA pada tahun 2018 telah dilaksanakan pada 20 desa, BPBD Banjarnegara memerlukan waktu satu bulan untuk menjalankan program pembentukan desa tangguh bencana dari mulai konsultasi sampai dengan evaluasi program. Penyusunan peta risiko bencana untuk tahun 2018 dilakukan pada 2 kecamatan, penyusunan peta risiko bencana

digunakan untuk menyajikan data daerah rawan bencana secara visual atau gambar. Masyarakat menyambut baik dengan adanya program mitigasi bencana ini.

Program mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara pada tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah disusun oleh BPBD Banjarnegara. BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana perlu meningkatkan produktifitas dalam segi penyusunan peta risiko bencana, karena dari 20 kecamatan BPBD Banjarnegara hanya memiliki 14 peta risiko bencana.

Kata Kunci: mitigasi, evaluasi, tanah longsor.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya, baik kaya sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kedua sumber daya tersebut akan selalu bersatu dan memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan saling mempengaruhi dan saling menjaga. Alam menjaga manusia sebaliknya manusia juga menjaga alam, maka akan terjalin hubungan yang serasi antara alam dengan manusi. Kekayaan alam Indonesia memiliki dampak bagi perubahan iklim dan cuaca baik secara kecil maupun perubahan yang besar, perubahan besar pada iklim dan cuaca juga dapat menyebabkan bencana yang disebut hidrometeorologi, adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca. (Paryono, Ario, Budi, Rokhimin, & Henny, 2017)

Tercatat kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia diantaranya pada 2018 sudah ada 2,572 kejadian bencana, dengan catatan korban jiwa meninggal sebanyak 4,814 jiwa, korban luka-luka sebanyak 21,083 jiwa dan jumlah pengungsi mencapai 10,333,309 jiwa. Untuk kerusakan infrastrukturnya bangunan dengan kondisi rusak berat berjumlah 150,513 bangunan, rusak sedang 39,815 bangunan, rusak ringan 129,837 bangunan. Semua bangunan atau fasilitas fisik yang rusak terdiri dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik umum, apotek, dan rumah sakit sebanyak 106 bangunan, fasilitas peribadatan sebanyak 857 bangunan dan fasilitas pendidikan 1,736 bangunan. Adapun rincian kejadian bencana sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana BNPB Tahun 2018

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)		Kerusakan (Unit)	
			Meninggal	Luka-Luka	Rumah	Fas. Umum
1.	Puting Beliung	807	24	176	15,857	134
2.	Banjir	679	119	221	4,280	738
3.	Tanah Longsor	473	167	127	2,076	49
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	370	4	4	2	
5.	Kekeringan	129	-	-	-	-
6.	Letusan Gunung Api	58	-	56	-	-

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id/>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bencana angin puting beliung menempati posisi pertama, bencana banjir di posisi kedua, dan tanah longsor berada di posisi ketiga. Dari ketiga bencana tersebut, bencana tanah longsor adalah bencana yang paling sulit untuk dilakukan mitigasi, karena bencana ini terjadi secara mendadak dan cepat. Mungkin bencana banjir dan tanah longsor disebabkan oleh hal yang sama yakni curah hujan dan kerusakan lingkungan seperti hutan gundul. Namun apabila kita bandingkan antara kedua bencana tersebut tanah longsor lebih cepat datang dan terjadi secara mendadak tanpa dapat dihindarkan. (BNPB 2018)

Tanah longsor adalah sebuah fenomena perpindahan batuan atau tanah berbentuk lereng atau gundukan yang bergerak kebawah atau keluar struktur yang ada, dan menyebabkan bentukan tanah atau bebatuan yang baru. Tanah longor dapat disebabkan oleh kondisi alam (dataran tinggi seperti bukit atau gundukan tanah) yang tidak dibarengi oleh manajemen perawatan dan penjagaan yang baik. Faktor alam dan faktor manusia selalu menjadi alasan terjadinya tanah longsor. Faktor alam adalah sebuah faktor yang secara alami sudah ada dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia, secara alam tanah longsor dapat terjadi dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan terjadi secara berturut-turut dengan keadaan dan bentuk lereng yang terjal juga curam tanpa adanya pepohonan dengan akar yang kuat untuk menahan pergerakan tanah ataupun bebatuan disekitar lereng tersebut. Faktor manusia adalah sebuah faktor yang disebabkan oleh manusia dan berdampak pada kelangsungan hidup pihak lain, faktor manusia juga sering disebut sebagai faktor menegemen, secara faktor manusia tanah longsor disebabkan oleh intensitas penggunaan

serta perawatan lahan, kepadatan penduduk, dan pembanguna infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Sulistyo Andri, 2017)

Banjarnegara secara geografis berada pada pertengahan bukit-bukit yang membentang di daerah Jawa Tengah, dengan demikian Banjarnegara memiliki banyak lereng dan gundukan tanah yang memiliki resiko tinggi akan bencana tanah longsor. Tanah yang subur dan gembur menjadikan Banjarnegara memiliki potensi hasil perkebunan dan hasil perhutanan yang cukup bagus, hal ini yang membuat para petani di Banjarnegara banyak mengalih fungsikan lahan yang tadinya ditanami pohon besar untuk menjaga tanah agar tidak longsor tetapi diganti menjadi lahan perkebunan. Apabila kita lihat dan kita cek kedataran tinggi bagian selatan Banjarnegara, tepatnya di daerah Banjarmangu, Wanayas, Karangobar, Batur, sampai ke Dieng telah banyak alih fungsi lahan yang dilakukan oleh petani setempat. Lahan yang tadinya ditanami dengan pepohonan besar sekarang diganti menjadi lahan pertanian sayur dan buah-buahan seperti kentang, sawi, wortel, dan lain sebagainya. Kondisi demikian terjadi bukan tanpa sebab, ada beberapa faktor yang mengakibatkan alih fungsi tersebut terjadi diantaranya, lahan untuk pertanian dijadikan bangunan sehingga lahan pertanian menjadi sempit, yang kedua adalah lahan akan lebih menguntungkan bagi petani apabila lahan tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian. Dan yang paling utama adalah faktor kesadaran akan bahaya tanah longsor yang selalu mengintai warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara khususnya adalah daerah-daerah di pegunungan Kabupaten Banjarnegara.

Program mitigasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penaggulangan bencana dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancama bencana dengan tetap menjaga keaslian serta kearifan sosial dan budaya setempat. Program mitigasi tidak hanya memberikan perlindunag kepada masyarakat namun juga memberika jaminan terselenggaranya program mitigasi dengan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh serta tetap menjaga asas gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan. Program mitigasi juga harus mampu menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir setiap daerah mencoba untuk membuat program mitigasi sesuai dengan UU yang berlaku namun juga masih dapat memberikan rasa aman serta dapat menjaga masyarakat dari ancaman bencana alam. Program mitigasi juga diselaraskan dengan potensi bencana yang akan terjadi disebuah daerah.(UU No. 24 Tahun 2007)

TUJUAN PENELITIAN

1. Memaparkan pelaksanaan program mitigasi bencana secara umum dan program mitigasi lebih mendalam mengenai mitigasi bencana tanah longsor
2. Memaparkan evaluasi program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara

PEMBAHASAN

A. Efektivitas

1. Adanya program mitigasi bencana tanah longsor

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara memiliki program mitigasi bencana yang didasarkan pada peraturan daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan keadaan, program mitigasi bencana tanah longsor juga diperkuat dengan adanya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banjarnegara. Apalagi pasca bencana tanah longsor Sijemblung pada tahun 2014 yang memakan korban mencapai 125 jiwa, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan mitigasi bencana tanah longsor melalui BPBD Banjarnegara.

Berikut akan dijelaskan mengenai program mitigasi atau upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara.

- a. Sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana

Sosialisasi ini biasanya dilakukan di desa-desa yang menurut peta rawan bencana termasuk dalam daerah rawan bencana dan sekolahan-sekolahan yang dekat dengan lokasi rawan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai daerah rawan bencana yang dapat membahayakan kelangsungan hidup apabila tidak dilakukan tindakan khusus. Bentuk dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebuah sosialisasi mengenai informasi-informasi daerah rawan bencana dan hal yang

dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana, BPBD Banjarnegara juga melakukan pengawasan daerah-daerah rawan bencana untuk dipantau perkembangan dari hasil sosialisasinya.

Peserta dari sosialisasi ini terdiri dari beberapa unsur masyarakat di desa tersebut, unsur masyarakat tersebut meliputi unsur perangkat desa, linmas, karangtaruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya. Jika ditotal peserta sosialisasi biasanya dihadiri oleh sekitar 35 peserta. Ke 35 peserta ini diharapkan mampu menerima materi dengan baik dan mampu mempraktikkan materi dengan baik, kemudian menyalurkan kepada masyarakat setempat agar seluruh masyarakat dapat sama-sama tahu dan saling mengingatkan ketika ancaman bencana datang. Sebetulnya BPBD Banjarnegara ketika melakukan sosialisasi dapat menghadirkan banyak peserta tetapi karena anggaran yang dimiliki oleh APBD hanya mencukupi untuk 35 peserta saja, maka peserta yang diundang hanya 35 peserta saja.

b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Pembentukan desa tangguh bencana bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar dapat melakukan mitigasi bencana dan evakuasi mandiri apabila terjadi bencana secara mendadak. BPBD Banjarnegara berharap dengan dibuatnya desa tangguh bencana dapat membantu BPBD dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana khususnya bencana tanah longsor. Proses pembuatan desa tangguh bencana meliputi:

- a) Sosialisasi rawan bencana, proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai desa tangguh bencana agar masyarakat dapat menentukan langkah selanjutnya ketika terjadi kemungkinan bencana.
- b) Kemudian dibentuk forum pengurangan risiko bencana, forum ini biasanya terdiri dari beberapa organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat terhadap risiko bencana kepada pemerintah.

- c) Dibentuk tim siaga bencana, tim ini dibentuk sebagai pertolongan terakhir dalam upaya mitigasi bencana, karena ketika sebuah program mitigasi bencana masih belum menunjukkan hasil yang baik maka tim inilah yang akan bertindak untuk mengambil keputusan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana
- d) Dilakukan pelatihan, proses ini menjadi tahapan terakhir dalam pembentukan desa tangguh bencana, dalam proses ini biasanya tim yang sudah tergabung dalam desa tangguh bencana melakukan pelatihan sesuai dengan kelompok dan kebutuhannya masing-masing..

c. Pembuatan Peta Risiko Bencana

Pembuatan peta risiko bencana didasarkan pada potensi kemungkinan kejadian bencana. Pembuatan peta risiko bencana ini bertujuan untuk memberikan data secara visual kepada siapa saja yang ini mencari data mengenai daerah yang memiliki potensi bencana. BPBD Banjarnegara berupaya dapat memperbaharui peta risiko bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara secara berkala. Tetapi karena keterbatasan biaya maka BPBD Banjarnegara belum pernah memperbaharui peta risiko bencana yang dimiliki. Berdasarkan kebutuhannya, peta risiko bencana harus diperbaharui selambat-lambatnya adalah 5 tahun sekali karena setiap tahunnya kondisi alam yang ada di Banjarnegara selalu berganti, bisa saja yang tadinya daerah tersebut merupakan daerah yang rawan bencana dengan tanda warna merah namun setelah 5 tahun kemudian sudah berkurang risikonya karena adanya program mitigasi bencana.

2. Rancangan Waktu dalam Menjalankan Program

Program mitigasi bencana tanah longsor BPBD Banjarnegara tertuang dalam rencana Strategis BPBD Banjarnegara tahun 2017-2022 baik rencana waktu dan target pencapaiannya. Program mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara selalu bersifat berkelanjutan, artinya program mitigasi akan terus berlanjut dan berjalan walau telah ganti periode kepemimpinan baik pemimpin

daerah maupun kepala BPBD, karena program mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD adalah program jangka panjang.

a. Waktu Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Sulistyono selaku kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan hasil bahwa sampai dengan bulan Desember 2018 BPBD Banjarnegara telah melakukan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana sebanyak 41 kali, 38 sosialisasi dilakukan di desa-desa dan 3 sosialisasi dilakukan di sekolah. Program sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk tahun 2018 BPBD Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana sebanyak 7 desa dan 1 sekolah.

Tabel Daftar Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana
Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Ancaman
1.	Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum	Longsor
2.	Desa Majatengan Kecamatan Kalibening	Longsor
3.	Desa Penanggungan Kecamatan Wanayasa	Longsor
4.	SMK Negeri 1 Pejawaran	Longsor
5.	Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur	Longsor
6.	Desa Tegaljeruk Kecamatan Pagentan	Longsor
7.	Desa Larangan Kecamatan Pagentan	Longsor
8.	Desa Nagasari Kecamatan Pagentan	Longsor

Sumber: BPBD Banjarnegara

Sosialisasi dilakukan sebulan sekali selama tahun 2018, sosialisasi hanya membutuhkan waktu satu hari saja. Sosialisasi dimulai pada pukul 08.00 dan selesai pada pukul 15.00. Sosialisasi dilakukan hanya sebulan sekali karena dalam kegiatan ini tidak hanya dilakukan sosialisasi saja melainkan

dilakukan juga pengawasan daerah rawan bencana. Untuk pengawasan daerah rawan bencana dilakukan secara berkala sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Pengawasan ini dilakukan secara online dengan menanyakan kondisi disekitar daerah rawan bencana atau BPBD Banjarnegara datang langsung ke daerah rawan bencana untuk melihat kondisinya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dari segi waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana sudah cukup efektif karena waktu yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup baik.

b. Waktu Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pembentukan desa tangguh bencana dilakukan berdasarkan rencana strategis yang telah disusun oleh BPBD Banjarnegara, waktu yang diperlukan dalam membuat sebuah desa tangguh bencana adalah 1 bulan terhitung dari kordinasi dan konsultasi sampai dengan pelaksanaan dan penetapan desa tangguh bencana. Daftar desa yang telah berhasil menjadi desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar Lokasi Yang Telah Menjadi Desa Tangguh Bencana

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Ancaman
1.	Sirongge	Pandanarum	Longsor
2.	Plorengan	Kalibening	Longsor
3.	Karangtengah	Wanayasa	Longsor
4.	Sampang	Karangkoobar	Longsor
5.	Ratamba	Pejawaran	Longsor
6.	Pejawaran	Pejawaran	Longsor
7.	Paketan	Madukara	Longsor
8.	Sopedang	Banjarmangu	Longsor
9.	Sawal	Sigaluh	Longsor
10.	Kebutuhjurang	Pagedongan	Longsor
11.	Bantar	Wanayasa	Longsor
12.	Mlaya	Punggelan	Longsor
13.	Tlaga	Punggelan	Longsor

14.	Gimingsir	Pagentan	Longsor
15.	Babadan	Pagentan	Longsor
16.	Pesantren	Wanayasa	Longsor
17.	Majasari	Pagentan	Longsor
18.	Sokaraja	Pagentan	Longsor
19.	Lawen	Pandanarum	Longsor
20.	Pringamba	Pandanarum	Longsor

Sumber: BPBD Banjarnegara

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah kecamatan Pagentan dengan jumlah 4 desa. Kecamatan yang paling sedikit memiliki desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah Kalibening, Karang Kobar, Banjarmangu, dan Sigaluh. Kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dimulai dari bulan Januari 2018 dan berakhir pada bulan Desember 2018. Kegiatan ini dilakukan pada setiap bulannya dan terkadang satu bulan BPBD Banjarnegara dapat menyelesaikan pembentukan desa tangguh bencana. Keefektifan ini juga didukung dengan adanya praktek secara langsung setelah dilakukan pelatihan secara teori oleh instansi-instansi terkait yang membantu BPBD Banjarnegara dalam melakukan pembentukan desa tangguh bencana.

c. Waktu Penyusunan Peta Risiko Bencana

Penyusunan atau pembuatan peta risiko bencana dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dilakukan berdasarkan kebutuhan ataupun keadaan suatu daerah, apabila daerah tersebut dirasa membutuhkan peta risiko bencana maka BPBD Banjarnegara akan membuat peta risiko bencana. BPBD Banjarnegara berencana akan menyusun peta risiko bencana sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara namun nyatanya peta risiko bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara hanya 14 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan peta risiko bencana ini dikerjakan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, di tahun 2018 BPBD Banjarnegara berhasil membuat peta risiko bencana sebanyak 2 peta yaitu peta risiko bencana di kecamatan Susukan dan kecamatan Purwanegara.

Pembuatan peta risiko membutuhkan waktu yang panjang karena disaat pembuatan peta tersebut dibutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Dari proses observasi lapangan untuk bahan data, sampai dengan proses pembuatan sketsa dan pembuatab bentuk peta sampai akhirnya sampai dengan proses pemberian warna sebagai tanda rawan atau tidak sebuah daerah terhadap resiko kejadian bencana.

3. Adanya Penyesuaian Program dengan Sumber Anggaran

Sampai dengan tahun 2018 semua biaya kegiatan BPBD Banjarnegara dibebankan kepada APBD yang diberikan pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada BPBD Banjarnegara, selain itu BPBD Banjarnegara sesekali mendapatkan bantuan dari dari sponsor dalam menjalankan program bahkan anggota BPBD Banjarnegara tidak sungkan untuk melakukan iuran agar program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik. Anggaran-anggaran yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara digunakan untuk menjalankan semua program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara, tidak hanya program mitigasi bencana saja melainkan semua program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara.

BPBD Banjarnegara selalu berupaya untuk mencukupi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dengan cara mencari sponsor dan melakukan serkiler dengan sesame relawan bencana (serkiler adalah kata lain dari iuran). Dalam upaya untuk membantu masyarakat dalam mengurangi resiko bencana, BPBD Banjarnegara tidak pernah mematok harga apabila dimintai tolong oleh masyarakat sebagai pemateri dalam sosialisasi mitigasi bencana. Karena bagi BPBD Banjarnegara dengan masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan sosialisasi mitigasi bencana saja sudah cukup membantu BPBD Banjarnega dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Tidak hanya diundang oleh warga masyarakat saja, biasanya BPBD Banjarnegara juga memenuhi undangan dari mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata di sekitar Banjarnegara, BPBD Banjarnegara selalu merasa senang ketika mendapatkan undangan untuk mengisis sosialisasi mengenai mitigasi bencana.

B. Efisiensi

1. Anggaran Khusus dari Pemerintah untuk BPBD Banjarnegara

Sumber anggaran yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara digunakan oleh BPBD Banjarnegara untuk menjalankan program. Semua rencana anggaran yang dikeluarkan oleh BPBD Banjarnegara telah tertera dalam rencana strategis BPBD Banjarnegara. Berikut akan dijelaskan anggaran yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana. Anggaran yang pertama adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana di tahun 2018 dilakukan di 5 kecamatan yaitu, kecamatan Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Batur, Pagentan menghabiskan biaya dengan rincian dana sebesar Rp 49.971.500.00,- dari anggaran Rp 500.000.000.00,- anggaran sebesar itu habis digunakan untuk pembelian alat tulis dan pembiayaan akomodasi serta digunakan untuk membeli bahan sosialisasi. Anggaran yang kedua adalah anggaran yang digunakan BPBD Banjarnegara dalam melakukan kegiatan pembuatan desa tangguh bencana adalah sebesar Rp 323.249.000,- dari anggaran yang dimiliki sebesar Rp 325.000.000,- biaya ini digunakan untuk membeli keperluan yang dapat menunjang keberlangsungan acara. Anggaran yang ketiga adalah anggaran yang digunakan BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program pembuatan peta resiko dengan jumlah total anggaran yang dimiliki adalah sebesar Rp 200.000.000,- dan digunakan atau diserap sebesar Rp 195.868.000,-. Dalam anggaran tersebut terdapat efisiensi anggaran pada Honor PPHP dan penggaandaan peta resiko bencana. (LKJIP BPBD Banjarnegara th 2018)

2. Sumber Daya Manusia atau Tenaga Profesional yang disediakan oleh BPBD Banjarnegara

BPBD Banjarnegara tidak memiliki tenaga profesional yang khusus menangani mitigasi bencana tanah longsor, karena BPBD Banjarnegara selalu bekerjasama dengan instansi terkait seperti SAR dan PMI dalam menjalankan program mitigasi bencana tanah longsor. Tenaga profesional atau tenaga ahli dapat dikatakan sebagai hal yang penting dalam mensukseskan program. BPBD Banjarnegara walaupun tidak memiliki tenaga profesional yang diproyeksikan untuk meneliti gerakan tanah dan menjalankan program kerja tetapi selalu mengupayakan untuk dapat mendeteksi pergerakan tanah agar dapat mengambil keputusan untuk

melakukan mitigasi bencana. Tetapi BPBD Banjarnegara memiliki bidang yang khusus menangani kegiatan mitigasi bencana.

3. Pembangunan Fasilitas Khusus

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendeteksi bencana maka BPBD Banjarnegara membuat fasilitas khusus untuk mendeteksi bencana yang bernama *early warning system/EWS*. BPBD Banjarnegara berharap agar EWS yang telah dipasang di beberapa titik rawan bencana dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar, berikut adalah contoh gambar dari EWS.

Foto Early Warning System



Sumber: BPBD Banjarnegara

Selain membuat EWS, BPBD Banjarnegara juga melakukan upaya pembangunan fasilitas yang lain, salah satunya adalah pemasangan rambu tanda rawan bencana dan membuat tambleg atau semacam patok pembatas agar daerah tersebut jangan dilalui atau bahkan dihuni. Pemasangan jalur evakuasi juga merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dibangun oleh BPBD Banjarnegara dalam upaya untuk memberikan alur evakuasi mandiri yang dapat dilakukan oleh warga sekitar kejadian bencana tanah longsor. Dalam pemasangan fasilitas pendukung BPBD Banjarnegara dibantu oleh warga sekitar dan terkadang dibantu oleh dinas PU. Upaya-upaya dalam pembuatan fasilitas ini juga merupakan salah satu usaha BPBD Banjarnegara untuk menyadarkan dan memberitahukan kepada warga mengenai kondisi daerah tersebut.

BPBD Banjarnegara dalam pembangunan fasilitas pendukung, perlu adanya pengkonsepan yang lebih matang lagi dan perlu pertimbangan yang lebih lagi dalam membangun fasilitas pendukung. Selain itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan BPBD Banjarnegara terhadap fasilitas yang telah dibangun agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa cara agar dapat memudahkan kinerja BPBD Banjarnegara dalam mengawasi fasilitas yang telah dibangun, yaitu dengan cara memberi pengertian mengenai fungsi dan tujuannya dibangun fasilitas tersebut kepada masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas tersebut, selain itu memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak merusak dan bahkan mengambil lalu menjual fasilitas tersebut menjadi salah satu cara yang baik dan efektif. Yang jelas harus tetap dipantau apa yang sudah dilakukan BPBD Banjarnegara agar program mitigas dapat berjalan dengan efisien. Jauh dari itu semua, ini juga dapat dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara agar tidak mengeluarkan anggaran kembali untuk membeli fasilitas ini kembali dan agar lebih efisien.

C. Kecukupan

1. Hasil dari Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Dari setiap program yang dibuat oleh BPBD Banjarnegara selalu memiliki rencana hasil dan realisasi hasil dari program. Berikut akan dijelaskan mengenai hasil dari program mitigasi bencana yang dirasakan oleh masyarakat:

a. Hasil Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Hasil yang diharapkan dari program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana oleh BPBD Banjarnegara adalah masyarakat menyadari bahwa daerah atau lingkungan yang mereka tinggali adalah daerah yang memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi, yang kedua adalah BPBD Banjarnegara berharap agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor dapat mendeteksi pergerakan tanah, selanjutnya BPBD Banjarnegara berharap agar ketika masyarakat mampu mendeteksi pergerakan tanah maka masyarakat mampu melakukan evakuasi dini secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari petugas dalam hal ini adalah BPBD Banjarnegara. Dan dari ketiga tujuan program diatas hampir terlaksanakan dengan baik.

Pasalnya ada beberapa masyarakat yang menyadari bahwa lingkungan disekitar dia atau bahkan lingkungan yang dia tinggali adalah lingkungan yang

memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi. Selanjutnya sudah ada beberapa masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor mampu mendeteksi pergerakan tanah bahkan sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan evakuasi secara mandiri dan saling membantu dalam melakukan evakuasi mandiri. Dalam hasil jumlah yang telah disosialisasi oleh BPBD Banjarnegara sampai tahun 2018 adalah sebanyak 41 Desa dengan 40 desa memiliki ancaman bencana tanah longsor dan 1 desa memiliki ancaman banjir.

b. Hasil Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Dalam menjalankan program ini BPBD Banjarnegara memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat dalam sebuah desa mengenai risiko bencana tanah longsor, selain itu pembentukan desa tangguh bencana juga bertujuan untuk melatih ketangguhan sebuah desa dalam melakukan pencegahan kejadian bencana tanah longsor dan dapat melakukan evakuasi secara bersama-sama, tujuan dibentuknya desa tangguh bencana juga untuk membantu BPBD Banjarnegara dalam melakukan program mitigasi bencana. Dari tujuan di atas ketercapaian hasil implementasi pada tahap baik karena sudah ada beberapa desa yang telah disosialisasi dan terjadi bencana, mereka mencoba untuk mempraktekan apa yang telah diberikan oleh BPBD Banjarnegara. Hasil dari jumlah desa yang telah dinyatakan sebagai desa tangguh bencana oleh BPBD Banjarnegara adalah sebanyak 39 desa dengan potensi ancamannya adalah bencana tanah longsor.

c. Hasil Penyusunan Peta Risiko bencana

Tujuan dari penyusunan peta risiko bencana adalah untuk memudahkan BPBD Banjarnegara dalam mencari mengamati daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi. Dengan adanya peta risiko bencana BPBD Banjarnegara mampu mencari dengan cepat daerah-daerah mana saja di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Hasil dari pembuatan peta risiko bencana dari segi jumlah sampai tahun 2018 BPBD Banjarnegara memiliki peta risiko bencana sebanyak 14 peta dengan risiko bencana adalah bencana tanah longsor. Hasil lain dari pembuatan peta risiko bencana adalah memudahkan BPBD Banjarnegara dalam menentukan program mitigasi tanah longsor yang sesuai dengan kondisi alam dan jenis lempengannya.

Hasil dari penyusunan risiko daerah rawan bencana mampu membantu BPBD Banjarnegara dalam mengawasi dan memantau pergerakan tanah dalam suatu daerah, melalui peta risiko bencana juga BPBD Banjarnegara dapat menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Hasil dari kegiatan ini juga mampu mempermudah masyarakat untuk mengetahui daerah tinggalnya apakah berada pada daerah rawan bencana. Peta risiko bencana juga dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur, karena petunjuk dari peta risiko bencana dapat membuat pemerintah untuk memberi perlakuan kepada daerah tersebut.

2. Alternatif Program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara

BPBD Banjarnegara selalu melakukan evaluasi dalam menjalankan program baik saat program berjalan sukses maupun saat program berjalan tidak sesuai rencana. Karena evaluasi dianggap mampu memberikan masukan untuk program yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara mengoreksi program yang sudah berjalan dan mengukur program yang sudah berjalan. Didalam evaluasi juga terkadang BPBD Banjarnegara membahas mengenai alternatif-alternatif pilihan program agar program yang dimiliki bisa memberikan manfaat yang baik secara maksimal. Alternatif-alternatif program yang dimiliki BPBD Banjarnegara tentunya dibuat untuk dapat menggantikan program yang direncanakan namun berjalan tidak sesuai rencana. Sejauh ini alternatif-alternatif yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara adalah melakukan penyederhanaan proses pembebasan lahan relokasi dan penyederhanaan prosedur bantuan sosial untuk korban bencana.

Program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dirasa sudah cukup untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Namun masih harus melakukan pembenahan dalam bidang pemantauan hasil, pemantauan hasil dapat berguna sebagai indikator penilaian ketercapaian program mitigasi bencana BPBD Banjarnegara. Selanjutnya adalah mengenai alternatif-alternatif yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sebagai upaya untuk jalan untuk membantu memudahkan BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana harus lebih ditailkan lagi, agar alternatif-alternatif tersebut dapat benar-benar membantu kelancaran program mitigasi bencana yang dimiliki dan dilakukan oleh BPBD Banjarnegara.

D. Kesamarataan

1. Manfaat yang Dirasakan Oleh Semua Pihak

Program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara didisain agar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana yang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana saja yang melibatkan semua elemen masyarakat, kegiatan pembentukan desa tangguh bencana juga melibatkan semua elemen masyarakat didesa tersebut bahkan elemen-elemen instansi lainnyapun diikut sertakan dalam program tersebut.

Tidak hanya melibatkan masyarakat saja, kegiatan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana juga melibatkan beberapa sekolah melalui program sekolah kebencanaan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Sekolah yang pernah disambangi oleh BPBD Banjarnegara untuk melakukan program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana adalah SMKN 1 Wanayasa pada tahun 2017, SLBN Banjarnegara pada tahun 2017, dan SMKN 1 Pejawaran pada tahun 2018.

2. Cara Penyampaian Informasi

BPBD Banjarnegara terus berupaya mensosialisasikan program mitigasi bencana adan mencoba untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana. Berbagai cara dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana tanah longsor baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan simulasi, memberikan informasi melalui media social yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara. Tidak itu saja BPBD Banjarnegara juga berupaya untuk menyadarkan masyarakat melalui poster-poster yang disebar di daerah rawan bencana tanah longsor.

BPBD Banjarnegara memiliki akun website yang dapat digunakan sebagai informa terpercaya. Web BPBD Banjarnegara menyajikan informasi mengenai gambaran umum BPBD Banjarnegara, alur pelaporan kejadian dan resiko bencana, serta dalam website resmi BPBD Banjarnegara juga menyertakan alamat kantor yang

dapat dikunjungi saat jam kerja dan menyertakan juga nomor telephone yang dapat dihubungi saat masyarakat membutuhkan bantuan BPBD Banjarnegara

BPBD Banjarnegara dalam memberikan pelayanan mengenai bencana tanah longsor berusaha agar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara BPBD Banjarnegara dalam memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai bencana tanah longsor. Apabila dilihat maka BPBD Banjarnegara sudah cukup samarata dalam menjalankan program. Namun alangkah lebih indahnya apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kemudian dalam pembuatan poster ataupun spanduk tentang mitigasi bencana tanah longsor dapat juga dilakukan di daerah yang tidak beresiko bencana tanah longsor agar dapat saling meningkatkan dan menjaga. Website resmi BPBD Banjarnegara perlu mengalami pembaharuan karena informasi-informasi yang seharusnya dapat meringankan beban kerja BPBD Banjarnegara belum semua tercantum. Beberapa dokumen tersebut adalah rencana strategis dan laporan kerja instansi pemerintah.

E. Responsivitas

1. Tanggapan masyarakat

BPBD Banjarnegara selalu mengharapkan tanggapan atau timbal balik yang diberikan oleh masyarakat agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara menyambut dengan baik seluruh program mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara. Hal ini didukung dengan adanya hasil dari survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan program yang dilakukan BPBD Banjarnegara. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan program yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara khususnya di dalam pelayanan program mitigasi bencana tanah longsor. Dari hasil survei tersebut BPBD Banjarnegara mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Survei Kepuasan Pelayanan BPBD Banjarnegara

No	Usur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinenerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3)*(5)
1	Persyaratan Pelayanan	3,175	Baik	0,111	0,352

2	Prosedur Pelayanan	3,088	Baik	0,111	0,343
3	Waktu pelayanan	3,175	Baik	0,111	0,352
4	Sasaran	3,088	Baik	0,111	0,343
5	Produk Layanan	3,088	Baik	0,111	0,343
6	Kompetensi Pelayanan	3,413	Baik	0,111	0,379
7	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,111	0,382
8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,463	Baik	0,111	0,384
9	Sarana dan Prasarana	3,413	Baik	0,111	0,379
Nilai Indeks					3,256
Nilai SKM					81,412
Mutu Pelayanan					B
Kinerja Unit Pelayanan					Baik

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Dari data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kepuasannya masyarakat terhadap pelayanan BPBD Banjarnegara terletak pada penanganan, pengaduan, saran dan masukan dengan total nilai sebesar 3,463 dan nilai kepuasan masyarakat terendah ada pada penilaiannya mengenai prosedur pelayanan, sasaran, dan produk layanan dengan nilai masing-masing yang didapatkan dari indikator ini adalah 3,088. Setelah itu nilai indeks yang dimiliki yang didapatkan oleh BPBD Banjarnegara sebesar 3,356 dengan nilai SKM sebesar 81,412 dan mendapatkan kategori Baik. Jadi masyarakat menilai bahwa pelayanan dan program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sudah baik.

2. Upaya untuk menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana

Program upaya-upaya lain yang dapat menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana milik BPBD Banjarnegara sebagai cara BPBD Banjarnegara untuk dapat mempertahankan hasil dari program mitigasi bencana yang ada. Program-program yang sudah terlaksana nampaknya harus selalu dipantau perkembangan serta dampaknya, hal ini dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara untuk menjaga konsistensinya dalam menjalankan program mitigasi bencana tanah longsor. Upaya menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana juga dijadikan sebagai cara untuk BPBD Banjarnegara terus melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan mitigasi bencana.

a) Upaya Pada Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Kegiatan upaya yang digunakan sebagai menjaga hasil ataupun dampak dari sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana adalah melakukan pengecekan daerah rawan bencana untuk kemudian dilihat perkembangannya apakah ada perbedaan setelah dilakukan sosialisasi dan pengkajian. Selain itu upaya tindak lanjut juga dilakukan oleh BPBD Banjarnegara apabila ketika dicek dan dipantau daerah tersebut malah semakin parah atau semakin berisiko bencana maka akan dilakukan penutupan lahan dan perawatan lahan serta akan dipasang rambu rawan tanah longsor.

b) Upaya Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pengupayaan-pengupayaan menjaga kekonsistensian desa dalam rangka desa tangguh bencana sangatlah penting. Sebab apabila sebuah desa konsisten dalam menjalankan program desa tangguh bencana maka desa tersebut akan semakin mampu untuk meminimalisir potensi bencana yang ada atau bahkan desa tersebut akan semakin kuat dalam melawan risiko bencana tanah longsor. Upaya-upaya yang dilakukan BPBD Banjarnegara untuk menjaga konsistensi desa tangguh bencana dengan cara melakukan pengecekan dan kunjungan melihat keadaan terkini desa tersebut. Kunjungan ini biasanya dilakukan untuk mengecek potensi bencana apakah semakin berkurang atau malah semakin bertambah.

c) Upaya dalam Pembuatan Peta Risiko Bencana

Sama dengan program-program sebelumnya, program pembuatan peta risiko bencana juga memerlukan upaya untuk mensukseskan dalam keberhasilan program. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD Banjarnegara adalah selalu memantau perkembangan daerah yang telah dibuat peta risiko bencana lalu kemudian memperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi terkini kedalam sebuah peta risiko bencana yang baru. Hal ini dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara dalam memantau perkembangan daerah yang berisiko mengalami bencana tanah longsor.

F. Ketepatan

1. Penilaian Masyarakat terhadap Program Mitigasi Bencana

Dalam menjalankan upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana, BPBD Banjarnegara selalu melakukan evaluasi baik secara internal bersama dengan elemen di dalam BPBD atau evaluasi bersama masyarakat. Bahan evaluasi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara berasal dari hasil program dan masukan serta penilaian masyarakat itu sendiri. Sejauh ini untuk ketiga program mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara masyarakat Kabupaten Banjarnegara menilai sudah cukup baik, hal ini didasarkan pada survei kepuasan pelayanan BPBD Banjarnegara.

BPBD Banjarnegara dalam menerima tanggapan masyarakat selalu terbuka untuk siapa saja apabila ingin memberikan saran, kritikan, dan masukan. Masyarakat bebas memberikan masukan saran dan kritik kepada BPBD Banjarnegara kapan saja dan dimana saja serta melalui apa saja. Boleh melalui pesan singkat, datang langsung ke kantor BPBD Banjarnegara atau melalui media sosial. Selain menyampaikan saran dan masukan, masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan keluhan atas kondisi alam yang diperkirakan dapat memicu bencana alam kepada BPBD Banjarnegara kapan saja dan melalui apa saja.

2. Penilaian BPBD Banjarnegara terhadap program mitigasi

Dalam menjalankan sebuah program biasanya instansi-instansi pemerintahan harus mampu menilai hasil dari pada program yang dimiliki, hal ini dijadikan sebagai bahan koreksi internal untuk kemudian apa yang masih belum baik dapat diperbaiki diketahui berikutnya. Penilaian ini juga dilakukan oleh BPBD Banjarnegara, menurut

sumber data yaitu Lembar Kinerja Instansi Pemerintahan BPBD Banjarnegara tahun 2018 menyatakan bahwa program mitigasi geologi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup efisien, hal ini disebabkan angka ketercapaian program baik dinilai dari realisasi anggaran maupun realisasi fisik sudah efisien. Data menerangkan bahwa pada program pembentukan desa tangguh bencana untuk indikator realisasi fisik mendapatkan angka 100% dari target 100% dan untuk realisasi anggaran adalah 99% dari 100% dengan keterangan terdapat efisiensi dalam biaya makan dan minum. Yang kedua adalah program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana dengan nilai realisasi fisik sebesar 100% dari target 100% dan realisasi anggaran sebesar 97% dari target 100% dengan keterangan terdapat efisiensi perjalanan dinas dalam daerah. Yang terakhir adalah pembuatan peta resiko bencana dalam realisasi fisik mendapatkan 100% dari target 100% dan realisasi anggaran mencapai 98% dari target 100% dengan keterangan terdapat efisiensi jasa pihak penyedia jasa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Banjarnegara adalah sebuah daerah yang memiliki gugusan pegunungan dengan potensi atau risiko kejadian bencana tanah longsor yang tinggi, hampir 70% wilayah di Kabupaten Banjarnegara adalah daerah yang rawan akan kejadian bencana tanah longsor. Selain faktor gugusan pegunungan faktor kondisi tanah yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Selain itu kondisi lahan dan hutan yang dirasa mulai berkurang sudah tidak mampu menopang lereng lagi. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk juga turut menjadi salah satu faktor terjadinya bencana tanah longsor karena ketika pertumbuhan penduduk yang semakin banyak maka dibutuhkan lahan yang semakin banyak pula untuk kebutuhan hunian dan lapangan pekerjaan. Biasanya masyarakat akan mengubah lahan yang tadinya dijadikan sebagai wilayah hutan dijadikan sebagai wilayah untuk mencari matapencaharian.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui BPBD Banjarnegara terus berupaya untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana tanah longsor melalui program mitigasi bencana yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya bencana tanah longsor. Program mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara

adalah sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana, pembentukan desa tangguh bencana, dan pembuatan peta risiko bencana. Semua program mitigasi yang dijalankan oleh BPBD Banjarnegara berjalan dengan baik dan mulai terlihat dampak atau manfaat dari program tersebut. Setiap program mitigasi yang dijalankan oleh BPBD Banjarnegara selalu disesuaikan dengan anggaran APBD dan rencana waktu yang telah disepakati, walau terkadang anggaran yang dimiliki tidak mencukupi tetapi BPBD Banjarnegara tetap menjalankan programnya sesuai waktu yang ditetapkan.

Selain penyadaran masyarakat terhadap bahaya bencana tanah longsor, BPBD Banjarnegara juga membangun fasilitas pendukung agar masyarakat terbantu dalam melakukan pengawasan bencana tanah longsor, fasilitas ini terdiri dari EWS, rambu btanda bencana, spanduk, dan pembuatan benteng untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Tidak hanya membangun BPBD Banjarnegara juga turut dalam proses perawatan dan pengawasan, namun proses perawatan dan pengawasan tidak ahnya dilakukan oleh BPBD saja melainkan melibatkan msyarakat sekitar.

Dalam menjalankan program mitigasi bencana BPBD Banjarnegara selalu berpatokan pada rencana kerja strategis yang telah disusun baik itu berpatokan kegiatn, waktu, maupun anggaran, sereta ketercapaian. Dari hasil penelitaian yang telah dijabarkan oleh peneliti di bab-bab sebelumnya menerangkan bahwa secara program kerja mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sudah termasuk efektif, hal ini dikarenakan ada beberapa program yang melebihi target dan rencana. Selanjutnya dari segi anggaran, BPBD Banjarnegara juga termasuk dalam kategori yang efisien dalam menjalankan program mitigasi bencana. Penyesuain program dengan anggran juga dapat dikatan sesuai dan pas dengan porsinya.

BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi selalu bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya spereti DINSOS, SAR, dan PMI. Mereka melakukan program mitigasi bersama-sama untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Selain menjalankan program bersama-sama BPBD Banjarnegara juga selalu melakukan evaluasi mengenai program secara bersama-sama. Evaluasi ini dianggap mampu memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing instansi yang melakukan program mitigasi bencana. Tidak hanya menerima evaluasi ataupun masukan dari instansi saja, BPBD Banjarnegara juga menerima dengan terbuka saran kritik dan masukan masyarakat. Saran dan kritik masyarakat dapat disampaikan

kepada BPBD Banjarnegara melalui apa saja, seperti melalui pesan singkat atau media sosial yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara. Selain itu masyarakat juga bisa datang langsung untuk memberikan saran kepada BPBD Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi> (diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 15.45)

<http://dibi.bnpb.go.id/> (diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 15.39)

<https://banjarnegarakab.go.id/v3/> (diakses pada 2 Februari pukul 10.00)

<https://bpbd.banjarnegarakab.go.id/> (diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 19.00)

<https://www.sejarah-negara.com/2017/05/peta-kabupaten-banjarnegara-lengkap-20-kecamatan.html> (diakses pada tanggal 2 Februari pukul 12.32)

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/030400> (diakses pada tanggal 15 Maret pukul 20.30)

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/76606/perlu-desa-tangguh-bencana> (diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 19.37)

Undang-Undang dan Dokumen Pemerintah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Rencana Strategis BPBD Banjarnegara Tahun 2012-2016

Rencana Strategis BPBD Banjarnegara Tahun 2017-2022

Lembar Kinerja Instansi Pemerintahan BPBD Banjarnegara Tahun 2018

Jurnal

Gentur Wiku Pribadi, K. (2013). *Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *GEMA PUBLICA*.
- Tejo, R. K., Baskoro, D. P. T., & Barus, B. (2018). Regresi Logistik Biner dan Rasional Untuk Analisis Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*.
- Bayuaji, D. G., Nugraha, A. L., & Sukmono, A. (2016). Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Geodesi Undip*.
- Suharjo, Drajat. (2007). Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana.. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*
- Dwi Priyono, Kuswaji. (2008). Analisis Merfosmetri dan Merfostruktur Lereng Kejadian Longsor di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal UMS*
- Susanti, P. D., Miardini, A., & Harjadi, B. (2017). Analisis Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Dasar Mitigasi di Kabupaten Banjarnegara (Vulnerability analysis as a basic for landslide mitigation in Banjarnegara Regency). *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 1(1), 49-59.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2013). Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13(2).
- Bayuaji, D. G., Nugraha, A. L., & Sukmono, A. (2016). Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(1), 326-335.
- Apriyono, A. (2009). Analisis penyebab tanah longsor di kalitlaga Banjarnegara. *Dinamika Rekayasa*, 5(1), 14-18.

Sulistyo, Andri., dkk. (2017). Pengetahuan Dasar Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara.